

# Effectiveness of the Next Generation Social Welfare Information System (SIKS-NG) Program in Sumorame Village

## Efektivitas Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di Desa Sumorame

Yesa Apriliya Damayanti<sup>1)</sup>, Hendra Sukmana<sup>\*,2)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup> Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: [Hendrasukmana@umsida.ac.id](mailto:Hendrasukmana@umsida.ac.id)

**Abstract.** *This study was motivated by issues regarding the effectiveness of the SIKS-NG program in poverty alleviation in Desa Sumorame, particularly related to human resource readiness, data management, and the accuracy of social assistance services. The study aimed to analyze the effectiveness of the SIKS-NG program using the information system effectiveness theory proposed by Richardus Eko Indrajit (2006). This research employed a descriptive qualitative method with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The findings showed that human resources and technological infrastructure were adequate, but obstacles remained in data verification, coordination, and the lengthy validation process. In addition, the system's impact had not been fully optimal due to dependence on old databases and limited social assistance quotas. This study contributes to improving digital public service policies and optimizing social welfare data management in rural areas.*

**Keywords** - SIKS-NG, Effectiveness, Indrajit's Theory, Social Welfare Information System

**Abstrak.** *Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan efektivitas program SIKS-NG dalam penanganan kemiskinan di Desa Sumorame, khususnya terkait kesiapan sumber daya manusia, pengelolaan data, dan ketepatan pelayanan bantuan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program SIKS-NG menggunakan teori efektivitas sistem informasi menurut Richardus Eko Indrajit (2006). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi sudah cukup memadai, namun masih terdapat kendala dalam proses verifikasi data, koordinasi, serta lamanya proses validasi data. Selain itu, dampak sistem belum sepenuhnya optimal karena masih bergantung pada database lama dan keterbatasan kuota bantuan sosial. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan pelayanan publik digital serta optimalisasi pengelolaan data kesejahteraan sosial di wilayah pedesaan.*

**Kata Kunci** - SIKS-NG, Efektivitas, Teori Indrajit, Sistem informasi kesejahteraan sosial

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan sistem informasi dan teknologi informasi saat ini telah menjadi sumber daya penting bagi organisasi, baik di sektor pemerintahan maupun swasta (Hammer & Champy, 1993). Teknologi dan sistem informasi kini tidak hanya berfungsi sebagai dukungan tambahan, tetapi sudah menjadi bagian dari operasi utama yang sangat potensial. Teknologi ini juga memiliki peran strategis yang signifikan dalam mendukung efektivitas, efisiensi, serta produktivitas dalam organisasi (Wheelan & Hunger, 2004). Kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan besar di dunia, membuat berbagai aktivitas menjadi lebih mudah dengan dukungan teknologi komputer. Hal ini terbukti dalam peningkatan efektivitas pada proses kerja yang panjang dan berulang, di mana komputer berperan penting dalam memperlancar aktivitas di dalam suatu instansi. Penggunaan Sistem Basis Data (*Database System*) selama ini telah memberikan dukungan signifikan bagi kinerja banyak instansi. Informasi memegang peran penting bagi organisasi dalam proses pengambilan keputusan, dan informasi tersebut dapat diperoleh melalui sistem informasi (*Information System*). Pemerintah terus berinovasi dan bersaing dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat dengan cara yang lebih *modern* dan efektif (Kurniasih & Wismaningtyas, 2020). Upaya ini juga dilakukan oleh Kementerian Sosial, yang berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan masyarakat melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) (Aisidah, 2020). Masyarakat merupakan pemangku kepentingan utama dalam implementasi *e-government*. Namun, dalam penelitian *e-government*, fokus pada masyarakat masih kurang dieksplorasi, karena sebagian besar proyek *e-government* hanya berfokus pada transformasi layanan dan informasi tradisional menjadi berbasis teknologi. Model-model penilaian kematangan *e-government* yang ada pun umumnya hanya menilai kemampuan teknologi dalam *e-government* (Wulansari & Inayati, 2019).

Sesuai dengan penerapan program SIKS-NG mencakup beberapa peraturan penting. Pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang mengatur strategi dan langkah-langkah pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia, termasuk pengelolaan bantuan sosial. Kedua, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan pemerintah untuk memberikan pelayanan sosial berbasis pada data yang valid dan akurat agar pelayanan lebih tepat sasaran. Ketiga, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial, yang menjadi acuan operasional dan pengelolaan SIKS-NG, memastikan bahwa sistem ini dapat digunakan secara efektif di seluruh wilayah Indonesia. Ketiga dasar hukum tersebut menciptakan landasan yang kuat bagi implementasi SIKS-NG dalam penanganan kemiskinan. SIKS-NG adalah sistem pengelolaan data yang dikembangkan oleh Pusdatin Kementerian Sosial. Pembangunannya dimulai pada pertengahan tahun 2017, dan aplikasi ini pertama kali diperkenalkan kepada pemerintah daerah melalui dinas sosial melalui bimbingan teknis (bimtek) berskala nasional yang diadakan di Jakarta pada Oktober 2017. Aplikasi ini tersedia dalam dua platform: SIKS-NG *offline* versi 1.0 dan SIKS-NG *online*, lengkap dengan logonya. SIKS-NG *offline* dapat digunakan oleh pemerintah kabupaten hingga tingkat desa, sedangkan SIKS-NG *online* hanya dapat diakses oleh petugas dinas sosial di tingkat kabupaten/kota. Sejak diluncurkan, aplikasi ini telah mengalami berbagai pengembangan untuk menyempurnakan fitur dan memperbaiki kekurangan atau bug berdasarkan masukan dari pengguna. Saat ini, versi terbaru SIKS-NG *offline* yang digunakan adalah versi 2.4.1. Pada tahun 2019, Kementerian Sosial memperkenalkan SIKS-NG berbasis *Android*, yang dikenal dengan nama SIKS-*droid*. Platform ini memudahkan petugas pendataan dalam melakukan verifikasi dan validasi data saat kunjungan rumah tangga menggunakan smartphone atau tablet, tanpa memerlukan cetakan prelist di atas kertas. SIKS-*droid* juga memiliki fitur untuk mendokumentasikan kondisi rumah, termasuk atap, lantai, dinding, identitas kepala rumah tangga, serta mencatat koordinat lokasi rumah tangga yang dikunjungi. Di tahun yang sama, SIKS-NG berhasil meraih sertifikat ISO 27001:2013 dalam kategori manajemen keamanan informasi.

Melalui Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas penanganan kemiskinan melalui penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan data kesejahteraan sosial. SIKS-NG bertujuan untuk menyediakan data yang lebih akurat dan real-time terkait keluarga miskin yang berhak menerima bantuan sosial. Dengan memanfaatkan sistem berbasis digital, program ini mempercepat proses verifikasi, identifikasi, dan pemantauan penerima bantuan sosial, yang pada gilirannya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas distribusi bantuan. Selain itu, SIKS-NG juga memungkinkan terjadinya koordinasi yang lebih baik antara instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah, serta mengurangi potensi kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial, sehingga bantuan tepat sasaran. Dukungan pemerintah pusat dan daerah sangat krusial dalam kelancaran penerapan program SIKS-NG di Desa Sumorame. Pemerintah pusat menyediakan pelatihan dan bimbingan teknis bagi perangkat desa dalam penggunaan aplikasi SIKS-NG, serta mengoptimalkan infrastruktur teknologi, seperti jaringan internet yang lebih baik, untuk mendukung operasional sistem. Pemerintah daerah, khususnya di tingkat kecamatan, juga memberikan dukungan dalam hal pemantauan dan evaluasi implementasi program, serta menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kelancaran akses data.

Di Desa Sumorame, program SIKS-NG ini mulai diperkenalkan pada tahun 2021 melalui sosialisasi yang dilakukan oleh para pendamping kecamatan dari Dinas Sosial. Setiap desa menunjuk satu orang sebagai operator yang bertanggung jawab atas pengelolaan aplikasi ini. Tugas operator desa adalah menginput data masyarakat yang tergolong miskin dan kurang mampu ke dalam aplikasi SIKS-NG. Data yang telah dimasukkan kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, yang berwenang untuk melakukan verifikasi dan validasi data tersebut. Di dalam aplikasi SIKS-NG terdapat beberapa fitur menu seperti *view* DTKS, rekap DTKS, daftar usulan dibatalkan, usulan DTKS desa/kelurahan, pengesahan usulan desa/kelurahan, usulan penghentian desa/kelurahan, dan perbaikan data. Adapun fungsi fitur tersebut Fitur *View* DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) memungkinkan pengguna untuk melihat dan memverifikasi data penerima bantuan sosial yang sudah terdaftar, memastikan bahwa data penerima sesuai dengan kriteria kemiskinan yang berlaku. Fitur Rekap DTKS memungkinkan pihak desa untuk melakukan rekapitulasi data penerima bantuan, yang berguna untuk evaluasi dan perencanaan lebih lanjut. Daftar Usulan Dibatalkan menampilkan daftar usulan yang dibatalkan, seperti usulan untuk penambahan atau penghapusan data penerima bantuan yang tidak memenuhi kriteria. Usulan DTKS Desa/Kelurahan digunakan untuk mengajukan atau memperbarui data penerima bantuan sosial di tingkat desa, seperti yang dilakukan di Desa Sumorame, agar data keluarga atau individu yang layak mendapatkan bantuan dapat diperbarui dengan tepat. Pengesahan Usulan Desa/Kelurahan memungkinkan pengesahan terhadap usulan yang diajukan oleh pihak desa, yang kemudian diproses oleh pihak berwenang. Usulan Penghentian Desa/Kelurahan digunakan untuk mengusulkan penghentian bantuan bagi penerima yang tidak lagi memenuhi syarat atau telah meninggal. Terakhir, fitur Perbaikan Data memungkinkan perbaikan atau pembaruan data penerima bantuan sosial, seperti perubahan alamat atau status keluarga, agar data yang tercatat selalu akurat dan tepat sasaran. Dengan penerapan aplikasi SIKS-NG, diharapkan penyaluran bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran dan berperan dalam menurunkan angka kemiskinan di Desa Sumorame. Namun, angka kemiskinan di wilayah ini masih tetap tinggi. Di Desa Sumorame, penerapan SIKS-NG membawa dampak yang

signifikan dalam peningkatan akurasi data penerima bantuan sosial. Sebelumnya, pengelolaan data penerima bantuan sering kali dilakukan secara manual, yang memunculkan potensi kesalahan dan ketidak tepatan dalam penyaluran bantuan. Dari masyarakatnya sendiri itu bisa mengajukan bantuan di desa meskipun tergolong warga mampu ataupun tidak mampu dan pihak desa tidak bisa berwenang penuh dalam proses validasi sistemnya, pihak desa hanya melakukan penginputan sesuai dengan pengajuan yang dilakukan oleh warganya lalu selanjutnya akan di seleksi sendiri oleh dinas sosial. Namun, dengan adanya SIKS-NG, proses verifikasi data kini dilakukan secara lebih efisien dan tepat melalui sistem berbasis digital, yang mempercepat identifikasi penerima yang benar-benar membutuhkan bantuan. Perangkat desa yang terlibat dalam proses ini mendapatkan pelatihan terkait penggunaan aplikasi SIKS-NG, sehingga dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih baik. Masyarakat juga merasa lebih yakin bahwa bantuan yang diterima sudah sesuai dengan kebutuhan mereka, karena proses seleksi dan verifikasi dilakukan dengan lebih transparan dan sistematis. Dampak positif dari penerapan SIKS-NG di Desa Sumorame sangat terasa. Program ini memberikan dampak langsung berupa peningkatan transparansi dalam pengelolaan bantuan sosial, mengurangi kesalahan dalam pencatatan data penerima bantuan, dan memastikan bantuan sosial dapat disalurkan dengan tepat sasaran. Fokus program yang memastikan bantuan sampai kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan menjadikan upaya pengentasan kemiskinan lebih efektif dan efisien. Selain itu, SIKS-NG juga mempercepat proses distribusi bantuan yang sebelumnya memakan waktu cukup lama, sehingga masyarakat yang membutuhkan bisa segera menerima bantuan. Dengan penggunaan data yang lebih akurat, SIKS-NG berperan dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan mempercepat pemulihan kesejahteraan sosial di tingkat desa.

**Tabel 1.**  
**Rekapitulasi Jumlah Warga Miskin yang Masuk DTKS di Desa Sumorame**

NO	Tahun	Warga Miskin DTKS
1	2021	507
2	2022	487
3	2023	487
4	2024	482

**Sumber: Diolah dari pemerintah Desa Sumorame (2025)**

Berdasarkan Tabel 1 mengenai rekapitulasi jumlah warga miskin yang masuk DTKS di Desa Sumorame, dapat diketahui bahwa jumlah warga miskin yang terdaftar mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 jumlah warga miskin yang masuk DTKS tercatat sebanyak 507 orang, kemudian menurun menjadi 487 orang pada tahun 2022 dan tetap pada angka yang sama di tahun 2023. Selanjutnya pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 482 orang. Data tersebut menunjukkan adanya penurunan jumlah masyarakat yang terdaftar dalam DTKS meskipun penurunannya tidak terlalu signifikan. Penurunan jumlah penerima dipengaruhi oleh kebijakan kuota dari Dinas Sosial atau pemerintah pusat. Dalam beberapa kasus, kuota penerima bantuan sosial disesuaikan dengan kebijakan anggaran dan hasil pemadanan data nasional sehingga jumlah masyarakat yang masuk DTKS dapat berkurang walaupun masih terdapat warga yang tergolong kurang mampu. Oleh karena itu, penurunan angka pada tabel tersebut tidak selalu sepenuhnya menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan menurun, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh kebijakan pembaruan data dan penyesuaian kuota bantuan sosial.

**Tabel 2**  
**Jumlah Penerima Bantuan di SIKS-NG**

No	Tahun	Jumlah yang Mendapat BPNT	Jumlah yang Mendapat PKH
1	2021	167	138
2	2022	178	142
3	2023	178	145
4	2024	181	161

**Sumber: Diolah dari pemerintah Desa Sumorame (2025)**

Berdasarkan Tabel 2 mengenai jumlah penerima bantuan di SIKS-NG di Desa Sumorame, diketahui bahwa jumlah penerima bantuan BPNT dan PKH mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah penerima BPNT pada tahun 2021 sebanyak 167 penerima, kemudian meningkat menjadi 178 penerima pada tahun 2022 dan 2023, serta kembali meningkat menjadi 181 penerima pada tahun 2024. Sementara itu, jumlah penerima PKH juga mengalami kenaikan dari 138 penerima pada tahun 2021 menjadi 142 penerima pada tahun 2022, meningkat menjadi 145 penerima pada tahun 2023, dan mencapai 161 penerima pada tahun 2024.

Peningkatan jumlah penerima bantuan tersebut dapat disebabkan oleh dua faktor. Pertama, adanya pembaruan dan perbaikan data masyarakat melalui sistem SIKS-NG yang membuat data penerima bantuan menjadi lebih akurat sehingga masyarakat yang sebelumnya belum terdaftar dapat diusulkan dan masuk sebagai penerima bantuan sosial. Kedua, meningkatnya kebutuhan ekonomi masyarakat akibat kondisi ekonomi yang belum stabil juga dapat menyebabkan bertambahnya warga yang memenuhi kriteria penerima bantuan sosial, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan rentan miskin. Kenaikan jumlah penerima BPNT dan PKH juga dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat dan Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam memperluas cakupan bantuan sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berupaya memastikan bantuan sosial dapat menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan, terutama keluarga miskin, lansia, ibu hamil, dan anak sekolah yang menjadi sasaran program PKH. Dengan demikian, peningkatan jumlah penerima bantuan setiap tahun menunjukkan adanya optimalisasi pendataan dan perluasan cakupan bantuan sosial di Desa Sumorame.

Berdasarkan observasi lapangan terdapat beberapa masalah dalam Efektivitas Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) di Desa Sumorame. diantaranya pertama, kurangnya staf yang terlatih dalam penggunaan aplikasi SIKS-NG. Hal ini berdampak pada lambatnya penanganan pengajuan dari masyarakat yang membutuhkan bantuan. Kedua, masalah jaringan yang sering terjadi juga menjadi hambatan signifikan. Operator SIKS-NG di desa sering mengalami kesulitan saat mengunggah data karena aplikasi berjalan lambat atau bahkan error ketika data diunggah terus-menerus.

Berdasarkan permasalahan yang muncul, penulis tertarik untuk menganalisis efektivitas program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) di Desa Sumorame dengan menggunakan teori efektivitas yang dikembangkan oleh Indrajit (2006). Teori yang dikemukakan oleh Indrajit (2006) efektivitas adalah tingkat keberhasilan suatu organisasi atau program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas menunjukkan sejauh mana hasil yang diperoleh sesuai dengan target atau sasaran yang diinginkan. Dengan demikian, berdasarkan teori Indrajit, 1) Teori ini menekankan pentingnya kualitas dan kompetensi staf dalam keberhasilan suatu sistem. 2) Indikator utama dalam teori ini adalah kompetensi staf, yang mencakup pelatihan teknis, pemahaman aplikasi, dan kemampuan dalam mengatasi masalah yang muncul selama operasional. 3) kualitas infrastruktur teknologi juga menjadi faktor krusial dalam keberhasilan sistem informasi. Infrastruktur yang tidak memadai dapat menghambat proses operasional dan efektivitas program. 4) efektivitas manajemen sistem turut berperan dalam memastikan sistem informasi dapat berfungsi dengan baik. 5) Dampak terhadap organisasi dan pengguna juga harus diperhatikan, karena sistem informasi yang tidak berjalan lancar akan memperlambat proses pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian ini diantara Penelitian yang dilakukan oleh Purnomo (2021) mengkaji pengaruh kualitas sistem informasi terhadap kinerja pelayanan publik, dengan fokus pada aplikasi berbasis teknologi dalam pengelolaan bantuan sosial di desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sistem informasi yang tinggi dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik, termasuk dalam penyaluran bantuan sosial. Hendra Sukmana (2023) efektivitas pelayanan via online (Plavon) Dukcapil. Aplikasi pelayanan publik berbasis online yang bertujuan mempermudah pelayanan masyarakat, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti kurangnya sosialisasi, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, dan gangguan jaringan internet. Penelitian lainnya, yaitu Rahmawati (2022), Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengurangi Garis Kemiskinan Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. mengevaluasi efektivitas SIKS-NG dalam meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial dan dampaknya terhadap pengelolaan kemiskinan. Hasil penelitian Rahmawati juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam mengelola data secara tepat, termasuk ketergantungan pada sumber daya manusia yang terlatih dan infrastruktur yang memadai.

Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas program SIKS-NG di Desa Sumorame dalam mendukung penanganan kemiskinan di tingkat desa. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program SIKS-NG mampu membantu pemerintah desa dalam proses pendataan, verifikasi, validasi, serta pengelolaan data masyarakat miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pelayanan berbasis digital melalui SIKS-NG dapat meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial sehingga bantuan dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan fokus utama pada efektivitas program SIKS-NG dalam penanganan kemiskinan di Desa Sumorame. Metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan mengenai fenomena yang terjadi berdasarkan fakta di lapangan, dengan peneliti

sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data (Saleh Sirajuddin, 2017). Menurut Sugiyono (2010:147), metode deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan generalisasi. Pendekatan ini diterapkan untuk menganalisis efektivitas program SIKS-NG di Desa Sumorame (Warshawsky & Paul, 1971). Lokasi penelitian berada di Desa Sumorame, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, yang dipilih karena terdapat indikasi permasalahan dalam implementasi program ini. Fokus penelitian meliputi efektivitas program SIKS-NG dalam proses pendataan masyarakat miskin, verifikasi dan validasi data DTKS, ketepatan sasaran penerima bantuan sosial, kesiapan sumber daya manusia, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, di mana data primer diperoleh melalui wawancara dengan perangkat desa, operator SIKS-NG, dan masyarakat penerima bantuan sosial, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, arsip desa, jurnal, serta data DTKS yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi guna memperoleh data yang sesuai dengan kondisi di lapangan sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan efektivitas program SIKS-NG secara mendalam. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan narasumber atau informan berdasarkan tujuan penelitian karena informan tersebut memiliki informasi yang relevan. Menurut Sugiyono (2011:68), sekretaris desa, kepala urusan kesejahteraan rakyat sekaligus sebagai operator SIKS-NG desa sumorame, masyarakat penerima bantuan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi (Unique, 2016). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis Miles dan Huberman (1984), yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan efektivitas program SIKS-NG secara mendalam. (Williamson et al., 2018).

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas mengacu pada dua hal yaitu secara teoritis maupun secara praktis, artinya terdapat ketelitian yang bersifat komprehensif dan mendalam dari sebuah penelitian. Karena efektivitas adalah suatu kondisi yang mempengaruhi keberhasilan dari suatu tindakan, artinya efektivitas adalah suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh pencapaian target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau institusi terkait guna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai. Etzioni dkk (1985:54- 55) dalam bukunya yang berjudul Organisasi Modern mendefinisikan efektivitas sebagai taraf keberhasilan usaha suatu organisasi untuk mencapai tujuan (Gibson et al., 2000). Penelitian ini dilakukan melalui wawancara secara langsung pada informan untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, melalui kegiatan wawancara maka didapatkan informasi sebagaimana harapan penulis sesuai teori Indrajit (2006) sebagai berikut :

#### A. Kesiapan Sumber Daya Manusia

Aspek penting dalam keberhasilan implementasi sebuah program. Menurut Indrajit (2006), kesiapan sumber daya manusia mencakup kemampuan, pengetahuan, dan komitmen aparatur dalam menjalankan sistem berbasis teknologi informasi. SDM yang kompeten dan siap menghadapi perubahan menjadi kunci utama dalam menjamin efektivitas program yang diterapkan oleh instansi atau organisasi pemerintah. Kesiapan ini meliputi pelatihan, pemahaman terhadap sistem, serta tanggung jawab dalam mengelola dan mengoperasikan sistem secara optimal. Berikut informasi hasil interview bersama Bapak Mujib Ridwan selaku Kasi Kesra yang bertanggung jawab memegang akun SIKS-NG di Desa Sumorame, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasie Kesejahteraan Desa sumorame terkait Kesiapan Sumber Daya Alam untuk mengaplikasikan system SIKSNG :

*“Ada kendala yang saya hadapi dalam menjadi operator system SIKSNG, umumnya yaitu pengajuan data dari setiap warga atau masyarakat mengajukan ke data DTKS kita tidak bisa menolak karena itu bagian pelayanan. Sedangkan status masyarakat itu mau tidak mesti, ada yang kudune mampu, onk yang bener-bener tidak mampu. Lah dari operator permasalahannya itu tidak bisa verifikasi nek kita menolak untuk tidak dimasukkan, yo salah karena tidak melayani itu yang nomor siji. Terus onk maneh didalam SIKSNG onok beberapa macam bantuan termasuk PPI, KIS, KIP, dan lain lain lah usulan dari setiap bantuan itu dibatasi atau ditentukan dengan tanggal dan waktu untuk mengusulkan setiap bulannya. Cuma yang jadi masalah e kadang operator onok kesibukan dengan ditentukannya waktu tersebut karepe dinas itu menggolongkan macam-macam bantuan tetapi dari operator dan warga yang mengajukan permohonan ditanggal itu kadang ada acara sehingga pengajuan permohonan itu harus di bulan selanjute karena sudah lewat tanggal e ”.* (Wawancara 25 Februari 2025). Dari pernyataan Kasie Kesejahteraan tersebut kesiapan sumber daya untuk pengoperasian system aplikasi SIKSNG sudah sangat baik akan tetapi masalahnya terletak dalam pengaploadan yang terkadang bersamaan dengan agenda lain.

Fakta di atas jika dikaitkan dengan teori Indrajit (2006) mengenai efektivitas implementasi sistem informasi di lingkungan pemerintahan, menunjukkan bahwa keberhasilan sistem tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan

teknologi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia, prosedur kerja yang jelas, serta dukungan kelembagaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan operator SIKS-NG di Desa Sumorame, terungkap bahwa masih terdapat kendala dalam proses verifikasi data masyarakat yang mengajukan masuk ke dalam DTKS. Operator merasa kesulitan karena tidak memiliki wewenang penuh untuk menyaring data berdasarkan kondisi riil warga, sementara pelayanan terhadap masyarakat tetap harus dijalankan. Lalu sistem pengusulan bantuan sosial yang dibatasi oleh tanggal dan waktu tertentu menyulitkan operator ketika terdapat benturan dengan kegiatan lain, yang mengakibatkan pengajuan warga harus ditunda ke bulan berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur yang kaku dan keterbatasan dalam pengelolaan waktu menjadi hambatan dalam efektivitas pelaksanaan sistem. Sesuai dengan teori Indrajit, sistem informasi akan efektif jika ditopang oleh elemen SDM yang kompeten, proses yang fleksibel dan adaptif, serta lingkungan yang mendukung. Ketidakseimbangan dalam salah satu elemen tersebut dapat menghambat tercapainya tujuan dari sistem yang telah dirancang.

Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Hendra Sukmana (2023) mengenai efektivitas PLAVON Dukcapil yang menemukan bahwa keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan kurangnya sosialisasi menjadi hambatan dalam pelayanan berbasis online. Selain itu, penelitian Rahmawati (2022) juga menunjukkan bahwa efektivitas sistem informasi bantuan sosial sangat dipengaruhi oleh kesiapan aparatur yang terlatih dalam mengelola data penerima bantuan sosial.

### **B. Kualitas Infrastruktur Teknologi**

Menilai efektivitas implementasi sistem informasi seperti SIKS-NG. Menurut Indrajit (2006), kualitas infrastruktur teknologi mencakup kelengkapan dan kesiapan perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), serta jaringan komunikasi data yang mendukung operasional sistem. Di Desa Sumorame, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, kualitas infrastruktur teknologi menjadi salah satu tantangan dalam pemanfaatan maksimal SIKS-NG. Berdasarkan wawancara dengan bapak Mujib Ridwan kasie Kesejahteraan operator aplikasi SIKSNG di Desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

*“ya nek infrastruktur teknologi iku memadai, baik system online dari internetnya dan perangkat seperti laptop mboh liyane iku wes memadai dari desa. Sudah mendukung semua untuk menjalankan proses pengoperasionalan aplikasi SIKSNG”.* (25 Februari 2025).

Dari wawancara di atas jika dikaitkan dengan teori Indrajit (2006) mengenai efektivitas system SIKS-NG di desa sumorame, menunjukkan bahwa salah satu faktor penting dalam keberhasilan sistem informasi adalah tersedianya infrastruktur teknologi yang memadai. Berdasarkan hasil wawancara dengan operator SIKS-NG di Desa Sumorame, diketahui bahwa infrastruktur pendukung seperti jaringan internet dan perangkat teknologi, seperti laptop dan peralatan lainnya, sudah tersedia dengan baik dan mendukung pengoperasian aplikasi SIKS-NG.

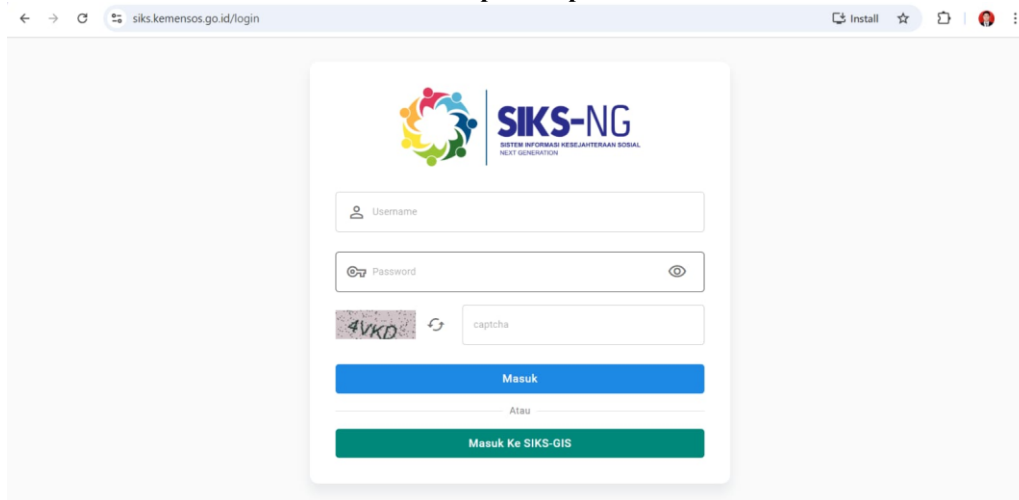
*“saya sudah memberikan fasilitas untuk mempermudah pengoperasian aplikasi SIKSNG agar operator tidak kesusahan saat pengaploudan data pengajuan dari permintaan masyarakatnya”.* (wawancara 10 Maret) Pernyataan dari bapak rochman selaku kepala desa sumorame kecamatan candi kabupaten sidoarjo.

Kondisi ini mencerminkan bahwa dari sisi teknologinya, desa sudah cukup siap untuk menjalankan sistem informasi. Sesuai dengan teori Indrajit, ketersediaan infrastruktur teknologi merupakan komponen penting dalam mendukung efektivitas sistem informasi, namun tetap perlu ditunjang oleh kesiapan sumber daya manusia, proses kerja yang efisien, serta komitmen kelembagaan agar sistem dapat berjalan secara optimal. Tanpa dukungan dari aspek-aspek lain tersebut, keberadaan teknologi yang memadai belum tentu menjamin keberhasilan implementasi program secara menyeluruh. Kualitas infrastruktur teknologi di Desa Sumorame sudah cukup memadai karena didukung jaringan internet dan perangkat teknologi yang mendukung operasional aplikasi SIKS-NG. Hasil ini sejalan dengan penelitian Purnomo (2021) yang menyatakan bahwa kualitas sistem informasi dan dukungan teknologi yang baik dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik berbasis digital.

### **C. Efektivitas Manajemen Sistem**

Keberhasilan implementasi sistem informasi seperti SIKS-NG di tingkat desa. Efektivitas manajemen sistem mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap seluruh proses operasional sistem informasi. Manajemen yang baik akan menjamin bahwa sistem dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta mampu memberikan manfaat secara maksimal bagi pengguna dan masyarakat. Dalam konteks ini, manajemen sistem harus mampu mengatur sumber daya yang tersedia, baik manusia, teknologi, maupun prosedur kerja, secara terstruktur dan berkesinambungan.

**Tabel 1 .**  
**Gambar Chapture Aplikasi SIKS-NG**



*Sumber: Diolah dari pemerintah Desa Sumorame (2025)*

Berdasarkan wawancara dengan bapak Rochman sebagai kepala desa Sumorame kecamatan candi kabupaten sidoarjo menyatakan.

*“ya ne nak sumorame pengolahan data sesuai dengan usulan ya biasae uwong iku onk perlune contoh e untuk bantuan, dadi warga mengajukan sendiri dengan ngisi form dari dinas sesuai ambek kebutuhan e mereka. Dan kita dari operator hanya mengaploud data yang usulkan, untuk selebihnya verifikasi diterima atau tidaknya iku dari Dinas Sosial sendiri”*(25 Februari 2025)

Dari pernyataan di atas jika dikaitkan dengan teori Indrajit (2006) mengenai efektivitas sistem informasi di lingkungan pemerintahan, menunjukkan bahwa proses kerja yang terstruktur dan jelas merupakan salah satu komponen penting dalam keberhasilan implementasi sistem. Berdasarkan hasil wawancara dengan operator SIKS-NG di Desa Sumorame, diketahui bahwa mekanisme pengolahan data dilakukan berdasarkan pengajuan langsung dari warga yang mengisi formulir sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti untuk bantuan sosial. Operator desa kemudian hanya bertugas mengunggah data ke dalam sistem, sementara proses verifikasi dan penentuan diterima atau tidaknya pengajuan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Dinas Sosial. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun alur kerja sudah ditentukan, masih terdapat keterbatasan dalam peran desa sebagai pelaksana teknis di lapangan. Sesuai dengan teori Indrajit, efektivitas sistem informasi akan tercapai jika terdapat keseimbangan antara teknologi, sumber daya manusia, proses kerja, dan dukungan kelembagaan. Ketika salah satu aspek, seperti koordinasi antarlevel pemerintahan atau kewenangan verifikasi, belum optimal, maka efektivitas program pun bisa mengalami hambatan meskipun sistem sudah berjalan secara procedural. Pengelolaan data dalam SIKS-NG sudah berjalan sesuai prosedur, di mana desa hanya bertugas mengunggah data usulan masyarakat sementara proses verifikasi dilakukan oleh Dinas Sosial. Hasil ini memiliki kesamaan dengan penelitian Purnomo (2021) yang menjelaskan bahwa efektivitas sistem informasi dipengaruhi oleh kejelasan prosedur kerja dan koordinasi antarinstansi. Penelitian Rahmawati (2022) juga menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga sangat menentukan keberhasilan pengelolaan data bantuan sosial agar program dapat berjalan tepat sasaran.

#### **D. Ketepatan Data dan Informasi**

Data dan informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu sangat menentukan kualitas pengambilan keputusan serta efektivitas pelayanan publik. Dalam konteks sistem informasi kesejahteraan sosial, ketepatan data mencakup validitas informasi yang diinput ke dalam sistem, kesesuaian dengan kondisi riil di lapangan, serta pembaruan data yang dilakukan secara berkala. Data yang tidak tepat atau usang dapat menyebabkan kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial, pendataan penerima manfaat, hingga perencanaan program ke depan. Berdasarkan wawancara dengan kasei Kesejahteraan sebagai operator aplikasi SIKSNG di Desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

*“informasi system SIKSNG dari dinas itu jadi dari kita yang menerima usulan nak SIKSNG iku mau menyampaikan waktu validasi dan verifikasi dalam dinas social iku paling enggak 3 sampai 6 Bulan. Dadi operator menginformasikan kepada pengaju waktu yang diperlukan untuk mengetahui data usulan masuk atau tidak kedalam*

*DTKS atau aplikasi SIKSNG tersebut iku 3 sampe 6 bulam, kadang ya onok beberapa pengajuan seng ga masuk”.* (10 Maret 2025)

**Tabel 2.**  
**Proses Usulan DTKS**

Tahapan	Penjelasan	Estimasi Waktu
<b>1. Pengusulan Data</b>	Pengajuan dilakukan oleh desa/kelurahan melalui musyawarah masyarakat untuk menentukan calon penerima.	1–3 Hari Kerja
<b>2. Verifikasi dan Validasi oleh Pemda</b>	Pemerintah daerah memeriksa dan memastikan kelayakan data sesuai kondisi riil di lapangan.	3–7 Hari Kerja
<b>3. Pengajuan ke Kemensos</b>	Data hasil verifikasi diajukan ke Kementerian Sosial melalui aplikasi SIKS-NG.	1–2 Hari Kerja
<b>4. Pengolahan oleh Pusdatin Kesos</b>	Data diproses dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) oleh Pusdatin Kemensos.	2–3 Hari Kerja
<b>5. Penetapan dan Masuk ke DTKS</b>	Data yang lolos akan ditetapkan sebagai penerima bansos dan masuk ke dalam DTKS resmi.	-
<b>6. Menunggu Jadwal Pencairan Bansos</b>	Setelah masuk DTKS, pencairan mengikuti kebijakan masing-masing program (PKH, BPNT, BST, dll).	Sesuai jadwal program
<b>Catatan Tambahan</b>	Jika ada perbaikan atau revisi data, maka seluruh proses bisa memakan waktu lebih lama dari estimasi awal.	Waktu tidak dapat dipastikan

*Sumber: Diolah dari pemerintah Desa Sumorame (2025)*

Pernyataan di atas dikaitkan dengan teori Indrajit (2006) mengenai efektivitas implementasi sistem informasi di lingkungan pemerintahan, menunjukkan bahwa keberhasilan sistem informasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kejelasan alur informasi, koordinasi antar lembaga, serta ekspektasi pengguna sistem. Berdasarkan hasil wawancara dengan operator SIKS-NG di Desa Sumorame, diketahui bahwa proses validasi dan verifikasi data oleh Dinas Sosial membutuhkan waktu antara tiga hingga enam bulan sejak pengajuan dilakukan. Informasi ini kemudian disampaikan oleh operator kepada warga yang mengajukan permohonan, namun dalam praktiknya, tidak semua pengajuan dapat diterima atau masuk ke dalam DTKS. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam kontrol waktu serta ketidakpastian hasil dari proses pengajuan yang dapat menimbulkan kebingungan atau ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Sesuai dengan teori Indrajit, efektivitas sistem informasi hanya dapat tercapai jika setiap unsur—baik teknologi, sumber daya manusia, prosedur, maupun kelembagaan—dapat berfungsi secara terpadu. Ketika proses birokrasi berjalan terlalu lama tanpa transparansi yang memadai, maka akan terjadi hambatan dalam pencapaian tujuan program dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang dijalankan. Proses validasi dan verifikasi data dalam SIKS-NG membutuhkan waktu cukup lama, yaitu sekitar tiga hingga enam bulan, dan tidak semua pengajuan masyarakat dapat diterima dalam DTKS. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahmawati (2022) yang menyatakan bahwa salah satu kendala utama dalam sistem bantuan sosial adalah ketepatan dan pembaruan data penerima bantuan. Penelitian Purnomo (2021) juga menjelaskan bahwa kualitas informasi dan akurasi data sangat menentukan efektivitas pelayanan publik berbasis sistem informasi.

#### **E. Dampak Terhadap Organisasi dan Pengguna**

Sistem informasi yang efektif seharusnya memberikan dampak positif yang signifikan, baik bagi organisasi penyelenggara maupun bagi pengguna akhir, dalam hal ini masyarakat. Dampak terhadap organisasi dapat dilihat dari meningkatnya efisiensi kerja, kemudahan dalam pengelolaan data, serta kualitas pelayanan yang lebih cepat dan akurat. Sementara itu, bagi pengguna, sistem yang efektif akan memudahkan akses terhadap layanan, meningkatkan transparansi, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara program. Sistem informasi juga seharusnya mampu menjawab kebutuhan dan harapan pengguna melalui fitur-fitur yang user-friendly serta proses yang tidak berbelit-belit. Berdasarkan wawancara dengan kasi Kesejahteraan operator aplikasi SIKSNG di Desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

*“sebenere ga onok dampak e se solae sebelum ada aplikasi SIKSNG iki wes onk data base yang sudah digunakan Dinas Sosial sehingga data lama iku mau akhir dimasukno nak aplikasi SIKSNG jadi iku emang data base yang lama, mungkin seng baru-baru iki yang mungkin cora manfaat e semisal onk seng mengajukan 50 pertahun tidak semua 50 itu masuk ya mungkin iso 20 atau 30an karena dari kemetrian sosial juga dibatasi tiap kuota provinsi lalu turun ke kuota kabupaten. Jadi ya tetep ada manfaat e tapi ga terlalu spesifik dan tidak terpengaruh”* (10 Maret 2025)

Fakta di atas jika dikaitkan dengan teori Indrajit (2006), menunjukkan bahwa efektivitas sistem informasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga pembaruan data dan relevansi informasi. Berdasarkan wawancara dengan operator SIKS-NG di Desa Sumorame, diketahui bahwa data dalam aplikasi sebagian besar berasal dari

database lama Dinas Sosial. Pengajuan data baru pun dibatasi oleh kuota dari pemerintah pusat, sehingga tidak semua usulan diterima. Hal ini membuat manfaat sistem belum sepenuhnya dirasakan. Sesuai teori Indrajit, sistem akan efektif jika data yang tersedia relevan, terkini, dan mendukung keputusan yang tepat. Keberadaan aplikasi SIKS-NG memberikan manfaat dalam pengelolaan data bantuan sosial, namun dampaknya belum dirasakan secara signifikan karena sebagian besar data masih menggunakan database lama dan pengajuan bantuan dibatasi oleh kuota dari pemerintah pusat. Hasil ini memiliki kesamaan dengan penelitian Rahmawati (2022) yang menemukan bahwa sistem bantuan sosial belum sepenuhnya efektif karena keterbatasan kuota dan validitas data penerima bantuan. Selain itu, penelitian Hendra Sukmana (2023) juga menunjukkan bahwa pelayanan berbasis online masih menghadapi kendala dalam memberikan dampak maksimal kepada masyarakat akibat keterbatasan pemahaman pengguna terhadap sistem digital.

## V. SIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya yang Pertama, dari aspek kesiapan sumber daya manusia di Desa Sumorame cukup baik, terlihat dari pemahaman operator terhadap sistem SIKS-NG, namun terbatasnya kewenangan dalam verifikasi dan benturan waktu pengajuan menjadi hambatan efektivitas. Kedua, aspek infrastruktur teknologi dinilai memadai dengan dukungan perangkat dan jaringan yang mendukung operasional sistem. Ketiga, aspek manajemen sistem berjalan sesuai prosedur, tetapi peran desa terbatas hanya sebagai pengunggah data, sementara verifikasi berada di tangan Dinas Sosial, yang menghambat efektivitas koordinasi. Keempat, aspek ketepatan data masih terkendala lamanya proses validasi dan ketidakpastian hasil, sehingga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat. Kelima, aspek dampak terhadap organisasi dan pengguna belum signifikan karena sistem masih mengandalkan data lama dan pengajuan baru dibatasi kuota, sehingga manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, bimbingan, serta motivasi. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yang sudah di surga dan keluarga tercinta yang selalu memberikan doa tanpa henti, kasih sayang, dukungan moral maupun material, serta semangat kepada penulis selama proses penyusunan tugas akhir ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan sahabat yang selalu memberikan dukungan, bantuan, dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini serta menjadi tempat berpulang disaat penulis hilang arah. Tidak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dan memberikan kontribusi dalam penyusunan tugas akhir ini.

## REFERENSI

- [1] Andriani, Yevi, Sri Suwitri, and Tri Yuniningsih. 2023. "Penerapan E-Government Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS - NG) Sebagai Aplikasi Pengolah Data Kemiskinan Di Kabupaten Bengkulu Selatan." *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi* 11(2):129–47.
- [2] Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. 2023. "Profil Kemiskinan Maret 2022 Kabupaten Sidoarjo." Retrieved (<https://sidoarjokab.bps.go.id/id/pressrelease/2023/03/06/34/profil-kemiskinan-maret-2022-kabupaten-sidoarjo.html>).
- [3] Haromin, Dhika Andriansyah. 2022. "Efektivitas Penerapan E-Government Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS - NG) Sebagai Aplikasi Pengolah Data Kemiskinan Di Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung." *Jurnal Jisipol* 6 Nomor 3(November):34–56.
- [4] Peraturan Menteri Sosial RI. 2021. *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)*.
- [5] Peraturan Pemerintah RI. 2015. *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Kementerian Sosial*.

- [6] Zebua, D. E. A., F. Hulu, M. H. Waruwu, and ... 2024. "Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation Untuk Pengolahan Data Kemiskinan Di Desa Balohili Botomuzoi." *Innovative: Journal Of ...* 4:1993–2000.
- [7] Y. P. Yuan *et al.*, "Government Digital Transformation: Understanding the Role of Government Social Media," *Gov. Inf. Q.*, vol. 40, no. 1, 2023.
- [8] Nabila Septia Warman, Syamsir Syamsir, Muhammad Maldini, Over Nurhasanah, Nadya Rahmah Oktariandani, and Iqur Hafizh Syafikruzi, "Implementasi Inovasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Pekanbaru," *Pros. Semin. Nas. Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya*, vol. 1, no. 2, pp. 132–148, 2022.
- [9] A. Rizk, L. Sundberg, M. Heidlund, and D. Toll, "Between continuity and change: A longitudinal analysis of Swedish local government digitalization strategies," *eJournal eDemocracy Open Gov.*, vol. 16, no. 2, pp. 49–73, 2024.
- [10] M. G. Prawira and A. A. S. P. Paraniti, "Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Pemerintah Kabupaten Tabanan," *J. Ilm. Raad Kertha*, vol. 6, no. 1, pp. 82–89, 2023.
- [11] D. Lasari and H. Ali, "Jurnal Mirai Management Strategi Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Dtks) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Pada Dinas Sosial Kabupaten Agam," *J. Mirai Manag.*, vol. 9, no. 1, pp. 2024–2036, 2024.
- [12] M. F. Hidayattullah, "Journal of Computer Networks , Architecture and High Performance Computing Sentiment Analysis of Covid-19 Bansos Issues on Twitter using Chi-Square and Naïve Bayes Journal of Computer Networks , Architecture and High Performance Computing," vol. 5, no. 2, pp. 571–578, 2023.
- [13] T. Aisyah, C. Sukmawati, M. Hasyem, and N. Aklima, "The Effectiveness of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) during the Covid-19 Period in Bireuen Regency," *J. Ilmu Sos. dan Ilmu Polit. Malikussaleh*, vol. 2, no. 2, p. 206, 2021.
- [14] L. Mursyidah and F. P. Arydianti, "Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Next Generation ( SIKS-NG ) Dalam Pengusulan Bantuan Sosial," vol. 10, 2024.
- [15] C. Marlinda, S. Satriadi, R. Risnawati, and T. Agusven, "Effectiveness and Implications of Provision of Covid-19 Assistance for Msmes in Tanjungpinang City," *Int. J. Econ. Bus. Account. Res.*, vol. 6, no. 2, p. 1442, 2022.
- [16] H. Maryana, "EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) ERA COVID-19 DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KECAMATAN NGAMPRAH KABUPATEN BANDUNG BARAT Hana," vol. 01, no. 01, 2024.
- [17] V. D. Windari and I. Rodiyah, "Efektivitas sistem informasi kesejahteraan sosial next generation (siks-ng) (studi di desa permisan kecamatan jabon kabupaten sidoarjo)," *Respository Univ. Muhammadiyah Sidoarjo*, pp. 1–11, 2023.
- [18] A. P. Ginandjar, E. T. Anomsari, and ..., "Efektivitas Program Layanan Digital Pengaduan Melalui LAPOR! di Dinas Perhubungan Kota Bandung," ... *Ilmu Adm.*, pp. 232–237, 2023.
- [19] E. H. Purwanti, "Penerapan E-Government Pada Aplikasi SIKS-NG di Desa Sihiong Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Toba," *PARAPOLITIKA J. Polit. Democr. Stud.*, vol. 4, no. 1, pp. 91–103, 2023.
- [20] Y. Andriani, S. Suwitri, and T. Yuniningsih, "Penerapan E-Goverment Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Sebagai Aplikasi Pengolah Data Kemiskinan Di Kabupaten Bengkulu Selatan," *J. Agreg. Aksi Reformasi Gov. dalam Demokr.*, vol. 11, no. 2, pp. 129–147, 2023.
- [21] Hasbullah, R. Aristin, S. Syaiful, S. Anam, and R. Kasanova, "Efektivitas organisasi dalam perspektif model Richard M Steers di Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang," *Kabilah J. Soc. Community*, vol. 7, no. 14, pp. 63–72, 2019.
- [22] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2019.
- [23] E. Barlian, "Metode Penelian Kualitatif & Kuantitatif (2 ed.)," Padang: Sukabina Press., 2018.
- [24] I. F. A. Sekar Arum Puspita Ramadhani, "Dinamika Governance," vol. 13, no. 02, pp. 43–54, 2023.
- [25] H. F. Pohan and F. N. S. Salisah, "Usability Analysis of Social Welfare Information System Next Generation Using McCall Method in Langkat District Social Service," *Int. J. Innov. Sci. Res. Technol.*, vol. 6, no. 8, 2021.

**Conflict of Interest Statement:**

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.